

AKUTANSI SEKTOR PUBLIK

PROSES AUDIT KINERJA

Dosen Pengampu:

Dr.Pujiati,S.Pd.,M.Pd.

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh :

Elsa triananda 2313031053

Eri Zenta Zikra Birama P 2313031040

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Proses Audit Kinerja” dengan tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai harapan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr.Pujiati,S.Pd.,M.Pd. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini

Selain itu, kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 15 November 2025

Kelompok 12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pengertian Audit Kinerja	3
2.2.Tujuan Audit Kinerja	4
2.3.Tahapan Atau Proses Audit Kinerja	5
2.4. Peran Audit Kinerja Dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah	6
2.5 Tantangan Plaksanaan Audit Kinerja di Sektor Publik.....	7
BAB III.....	9
PENUTUP.....	9
3.1. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
3.2. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	11
STUDI KASUS.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan sektor publik memegang peran penting dalam upaya pemerintah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Setiap anggaran yang dialokasikan untuk program atau kegiatan harus digunakan secara tepat sasaran agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Namun, kompleksitas birokrasi dan luasnya cakupan pelayanan pemerintah sering kali menimbulkan risiko penyimpangan, pemborosan, atau ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintah tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Salah satu instrumen pengawasan tersebut adalah audit kinerja, yaitu evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan program untuk menilai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Berbeda dengan audit keuangan yang berfokus pada ketepatan pencatatan dan kesesuaian anggaran, audit kinerja lebih menilai kualitas pelaksanaan program, proses kerja, serta hasil yang dicapai. Dengan audit kinerja, pemerintah dapat mengetahui apakah suatu program dikelola dengan baik, apakah sumber daya digunakan secara optimal, dan apakah tujuan organisasi tercapai sesuai rencana. Audit ini juga membantu mendeteksi kendala, kelemahan manajemen, serta peluang perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat, audit kinerja menjadi bagian penting dari penerapan *good governance*. Hasil audit kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi dasar bagi reformasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Rekomendasi yang dihasilkan auditor dapat membantu instansi pemerintah melakukan pembenahan internal, memperbaiki proses kerja, serta meningkatkan efektivitas program yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses audit kinerja sangat relevan bagi mahasiswa akuntansi sektor publik sebagai calon profesional yang akan berperan dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian audit kinerja dalam sektor publik?
2. Apa tujuan utama dilaksanakannya audit kinerja?
3. Apa saja tahapan atau proses dalam audit kinerja?
4. Bagaimana peran audit kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah?
5. Apa tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan audit kinerja di sektor publik?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan tentang Laporan Keuangan Sektor Publik ini adalah:

1. Mengetahui pengertian audit dalam sektor publik
2. Memahami tujuan utama dilaksanakannya audit kinerja
3. Mengetahui dan memahami tahapan atau proses dalam audit kinerja
4. Memahami peran audit kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan trasparansi pemerintah
5. Memahami tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan audit kinerja di sektor publik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan salah satu bentuk pemeriksaan yang ditujukan untuk menilai sejauh mana suatu entitas pemerintah mampu menjalankan program, kegiatan, atau pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis. Audit ini tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan, tetapi lebih jauh menilai kualitas proses manajemen serta hasil yang dicapai oleh organisasi sektor publik. Menurut BPK RI (2021), audit kinerja adalah pemeriksaan yang menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) dalam pengelolaan sumber daya publik. Definisi ini menekankan bahwa audit kinerja tidak hanya melihat apakah anggaran digunakan, tetapi juga bagaimana nilai manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut.

Di sisi lain, Mahmudi (2020) menyatakan bahwa audit kinerja merupakan pendekatan evaluatif yang digunakan untuk menilai bagaimana instansi pemerintah bekerja dalam menghasilkan output dan outcome tertentu serta seberapa baik instansi tersebut mengelola sumber daya yang dimilikinya. Menurut Mahmudi, audit kinerja berfungsi sebagai alat untuk menilai berhasil tidaknya suatu program sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan menggabungkan perspektif tersebut, audit kinerja dapat dipahami sebagai proses evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian tujuan suatu program pemerintah, dengan fokus pada penciptaan nilai publik. Audit ini memeriksa tidak hanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga apakah kegiatan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, audit kinerja menjadi komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil (*result-oriented governance*).

2.2 Tujuan Audit Kinerja

Audit kinerja memiliki tujuan yang sangat penting dalam pengelolaan sektor publik, terutama dalam rangka memastikan bahwa proses birokrasi dan penggunaan anggaran negara berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai prinsip ekonomis. Audit kinerja bukan hanya sebuah mekanisme penilaian, tetapi juga instrumen pengembangan organisasi yang bertujuan memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks modern, audit kinerja menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan publik benar-benar

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

Salah satu tujuan utama audit kinerja adalah menilai efektivitas program pemerintah, yaitu mengukur sejauh mana kegiatan dan output program mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya menilai pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga menilai dampak, relevansi, dan kualitas hasil program. Hal ini penting karena banyak program pemerintah yang secara administratif terselesaikan, namun tidak menghasilkan dampak signifikan bagi masyarakat. Studi oleh Fitriani & Abdullah (2023) menyebutkan bahwa efektivitas program sering menjadi indikator yang paling relevan dalam menentukan keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

Selain efektivitas, audit kinerja juga memiliki tujuan untuk menilai efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya pemerintah secara optimal dengan meminimalkan pemborosan. Efisiensi mengukur bagaimana input seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu digunakan untuk menghasilkan output. Instansi yang efisien adalah instansi yang mampu memproduksi layanan berkualitas dengan biaya minimal. Menurut Mahmudi (2020), konsep efisiensi dalam sektor publik sangat penting karena pemerintah tidak boleh menggunakan anggaran secara berlebihan, mempertimbangkan bahwa dana tersebut berasal dari masyarakat.

Tujuan lainnya adalah menilai ekonomis, yaitu kemampuan instansi memperoleh sumber daya dengan kualitas yang sesuai namun dengan biaya paling rendah. Ekonomis berbeda dengan efisiensi; ekonomis lebih menekankan pada proses pengadaan dan pemanfaatan sumber daya sebelum digunakan dalam program. Dengan demikian, auditor kinerja mengevaluasi apakah pemerintah membeli barang, jasa, atau sumber daya lain dengan cara yang hemat dan sesuai standar kualitas. Aspek ekonomis memiliki dampak langsung terhadap penghematan anggaran negara dan mendorong terciptanya nilai tambah dalam penggunaan dana publik.

Selanjutnya, audit kinerja bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan bagi instansi pemerintah. Rekomendasi ini mencakup perbaikan prosedur, penguatan pengendalian internal, perbaikan sistem pelaporan, hingga peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Tanpa rekomendasi, audit kinerja tidak memiliki nilai strategis. Rahmawati & Yudianto (2021) menekankan bahwa rekomendasi yang berasal dari audit kinerja dapat menjadi dasar perbaikan manajerial dan administratif yang signifikan apabila ditindaklanjuti secara optimal oleh instansi pemerintah.

Audit kinerja juga memiliki tujuan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik. Dengan adanya audit kinerja, instansi wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan serta setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas ini mencakup pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja, bukan hanya kesesuaian administratif. Melalui audit

kinerja, masyarakat dapat mengetahui apakah pemerintah telah menjalankan tugas secara efektif dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan, integritas, serta orientasi hasil.

Dengan demikian, tujuan audit kinerja tidak hanya sebatas menghasilkan laporan pemeriksaan, tetapi juga menjadi mekanisme pembelajaran organisasi serta pendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Audit kinerja membantu pemerintah untuk lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil dalam melayani masyarakat.

2.3 Tahapan atau Proses Audit Kinerja

Proses audit kinerja dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan harus dilakukan secara sistematis agar hasil audit benar-benar objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan audit kinerja secara umum meliputi

1.Tahap Perencanaan Audit

Pada tahap ini, auditor melakukan identifikasi awal terhadap program atau kegiatan yang akan diperiksa. Auditor menganalisis risiko, menetapkan tujuan audit, dan menentukan ruang lingkup serta metodologi pemeriksaan. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan audit karena menentukan data apa yang akan dikumpulkan dan aspek mana yang akan diprioritaskan. Menurut Fitriani & Abdullah (2023), tahap perencanaan yang kurang matang sering menjadi penyebab ketidaktepatan fokus audit dan lemahnya rekomendasi yang diberikan

2.Tahap Pelaksanaan Audit (Pemeriksaan Lapangan)

Tahap ini merupakan inti dari audit kinerja. Auditor mengumpulkan bukti audit melalui wawancara, observasi langsung, telaah dokumen, pengujian pengendalian internal, dan analisis data kinerja. Pada tahap ini auditor melakukan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan ekonomis berdasarkan standar dan indikator yang relevan. Bukti audit harus cukup dan kompeten agar dapat mendukung kesimpulan yang dibuat auditor.

3.Tahap Pelaporan Audit

Setelah bukti terkumpul dan dianalisis, auditor menyusun laporan audit yang berisi temuan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Laporan harus objektif, jelas, dan memberikan masukan yang dapat ditindaklanjuti. Hasil laporan ini biasanya disampaikan

kepada manajemen instansi dan pemangku kepentingan terkait agar dapat digunakan sebagai dasar kebijakan

4.Tahap Tindak Lanjut Rekomendasi

Tahap tindak lanjut merupakan indikator keberhasilan audit kinerja. Instansi pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan perbaikan sistem, proses kerja, atau kebijakan. Menurut Alwardat (2022), tanpa tindak lanjut yang jelas, audit kinerja tidak akan memberikan dampak signifikan meskipun temuan dan rekomendasinya tepat. Dengan melalui tahapan tersebut, audit kinerja dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan tata kelola sektor publik.

2.4 Peran Audit Kinerja dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah

Audit kinerja memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks modern, ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya menuntut penggunaan anggaran yang tepat, tetapi juga hasil nyata yang berdampak pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, audit kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap proses dan output program pemerintah berjalan sesuai standar, prosedur, dan tujuan pembangunan nasional. Dengan audit kinerja, pemerintah dapat menunjukkan bahwa kebijakan dan anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat publik yang optimal.

Pertama, audit kinerja memperkuat akuntabilitas publik. Akuntabilitas mencakup kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, proses pengelolaan anggaran, serta pencapaian program yang telah direncanakan. Hasil audit kinerja menyediakan informasi objektif mengenai kinerja instansi sehingga publik dapat menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Mahmudi (2020), audit kinerja berperan dalam memastikan bahwa sumber daya pemerintah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga memudahkan publik dan pemangku kepentingan menilai tanggung jawab pemerintah.

Kedua, audit kinerja mendorong transparansi pemerintahan. Laporan audit yang dipublikasikan memungkinkan masyarakat mengakses informasi jelas mengenai kelemahan, capaian, dan kualitas suatu program. Transparansi ini merupakan aspek penting dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran, karena semakin terbuka pemerintah, semakin kecil ruang untuk praktik tidak etis. Fitriani & Abdullah (2023) menegaskan bahwa audit kinerja adalah alat kontrol eksternal yang mampu mengurangi risiko moral hazard dan

meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparatur negara.

Ketiga, audit kinerja berkontribusi pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah. Melalui rekomendasi yang diberikan auditor, pimpinan instansi dapat mengevaluasi kelemahan struktural maupun manajerial dalam pelaksanaan program. Temuan audit juga membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan sistem, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan mengalokasikan anggaran secara lebih strategis. Hal ini sejalan dengan pandangan Alwardat (2022) yang menyatakan bahwa audit kinerja mendorong organisasi sektor publik melakukan inovasi dan memperbaiki proses kerja agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, audit kinerja tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme evaluasi, tetapi juga berperan sebagai pendorong reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Kualitas audit yang baik akan berkontribusi langsung pada peningkatan integritas pemerintahan serta efektivitas program pembangunan.

2.5 Tantangan Pelaksanaan Audit Kinerja di Sektor Publik

Meskipun audit kinerja memiliki manfaat besar, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas hasil pemeriksaan. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek teknis, struktural, hingga budaya organisasi, sehingga diperlukan strategi komprehensif untuk memastikan audit berjalan optimal. Tantangan pertama adalah kualitas data yang belum optimal. Banyak instansi pemerintah masih menggunakan sistem informasi yang belum terintegrasi dan belum sepenuhnya digital. Kondisi ini menyebabkan auditor kesulitan dalam mengakses data yang lengkap, valid, dan tepat waktu. Alwardat (2022) menegaskan bahwa data yang tidak konsisten atau tidak mutakhir menjadi hambatan terbesar dalam proses audit kinerja, karena kualitas analisis sangat tergantung pada kualitas data. Jika data bermasalah, auditor berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat.

Tantangan kedua adalah rendahnya pemahaman aparatur pemerintah mengenai audit kinerja. Banyak pegawai masih menganggap audit hanya sebatas pemeriksaan kepatuhan administratif. Padahal audit kinerja berfokus pada pencapaian tujuan, efektivitas output, dan dampak program. Pandangan yang keliru ini sering menyebabkan resistensi terhadap auditor, keterlambatan dalam memberikan data, dan kurangnya keterbukaan selama proses audit. Penelitian Rahmawati & Yudianto (2021) menunjukkan bahwa resistensi internal dan minimnya literasi aparatur mengenai audit kinerja menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam evaluasi program pemerintah.

Tantangan ketiga adalah kompleksitas birokrasi dan banyaknya pemangku kepentingan. Program pemerintah sering kali melibatkan berbagai kementerian, lembaga daerah, hingga pihak

non-pemerintah. Situasi ini membuat alur implementasi program sulit ditelusuri secara jelas dan menantang bagi auditor dalam mengevaluasi efektivitas setiap komponen. Fitriani & Abdullah (2023) menyebutkan bahwa semakin kompleks suatu program, semakin sulit mengukur kinerjanya secara objektif, terutama jika indikator kinerjanya tidak terukur dengan baik.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan auditor dan sumber daya pendukung. Jumlah auditor bersertifikat kinerja belum sebanding dengan banyaknya entitas pemerintah yang harus diaudit. Selain itu, beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu sering berdampak pada kualitas pemeriksaan. Auditor membutuhkan kemampuan analisis, pemahaman program, serta keahlian teknis yang memadai, sehingga kekurangan SDM dapat melemahkan kualitas audit.

Tantangan terakhir adalah pengaruh politik dan kepentingan tertentu. Dalam beberapa kasus, rekomendasi audit tidak ditindaklanjuti karena instansi merasa tidak siap melakukan perubahan atau karena adanya tekanan politik. Kondisi ini menghambat proses perbaikan dan mengurangi efektivitas audit kinerja sebagai alat kontrol dan evaluasi kinerja pemerintah. Menurut Abdullah (2022), faktor politik memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen tindak lanjut hasil audit. Dengan memahami berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan langkah strategis seperti penguatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem informasi, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan komitmen tindak lanjut rekomendasi. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit kinerja dan memperkuat akuntabilitas sektor publik secara menyeluruh.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai proses audit kinerja dalam sektor publik, dapat disimpulkan bahwa audit kinerja merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Audit kinerja tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis suatu program pemerintah. Melalui audit kinerja, auditor dapat memberikan penilaian objektif mengenai pencapaian tujuan organisasi serta memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja instansi.

Tujuan audit kinerja mencakup upaya memastikan bahwa sumber daya publik dimanfaatkan secara optimal, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa anggaran negara digunakan dengan tepat sasaran. Tahapan audit kinerja yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut menjadi fondasi penting untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas.

Selain itu, audit kinerja memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Hasil audit dapat menjadi alat kontrol bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik. Namun demikian, implementasi audit kinerja masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kualitas data, pemahaman aparatur yang bervariasi, keterbatasan auditor berpengalaman, serta kompleksitas birokrasi. Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi agar audit kinerja dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi sektor publik. Secara keseluruhan, audit kinerja merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan modern yang bertujuan mewujudkan pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai audit kinerja di sektor publik, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki kualitas data dan memperkuat sistem informasi kinerja agar auditor dapat memperoleh informasi yang akurat dan lengkap. Sistem pelaporan digital yang terintegrasi juga perlu ditingkatkan untuk meminimalkan kesalahan data dan mempermudah proses evaluasi. Kedua, peningkatan kompetensi aparatur serta auditor menjadi langkah yang sangat penting. Pelatihan yang berkelanjutan dan penambahan auditor yang memiliki sertifikasi

profesional perlu dilakukan untuk menghadapi kompleksitas audit kinerja yang semakin meningkat.

Selain itu, reformasi birokrasi diperlukan untuk menyederhanakan proses administrasi dan pengukuran kinerja sehingga auditor dapat melakukan evaluasi lebih efisien dan instansi lebih mudah menindaklanjuti rekomendasi. Budaya akuntabilitas dan transparansi juga harus diperkuat di setiap instansi pemerintah agar audit kinerja dapat diterima sebagai kegiatan perbaikan, bukan semata pengawasan. Terakhir, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi audit ditindaklanjuti secara optimal. Pemantauan rutin terhadap pelaksanaan tindak lanjut sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi auditor benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2022). Political Influence on Audit Recommendation Follow-Up in Government Institutions. *Governance and Public Policy Review*, 11(2), 78–91
- Alwardat, A. (2022). Performance Auditing in the Public Sector: Challenges and Opportunities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(1), 45–62
- BPK RI. (2021). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Fitriani, R., & Abdullah, S. (2023). Challenges in Implementing Performance Audits in Indonesian Public Sector. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(2), 101–116.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahmawati, D., & Yudianto, I. (2021). Factors Influencing the Implementation of Performance Audits in Government Institutions. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 9(3), 233–247.

STUDI KASUS

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk meningkatkan layanan kesehatan di beberapa rumah sakit besar, termasuk RSUD dr. Soetomo Surabaya. Rumah sakit ini menjadi rujukan utama bagi pasien dari berbagai daerah di Jawa Timur, sehingga peningkatan kapasitas alat kesehatan dianggap sangat mendesak. Dalam perencanaan awal, rumah sakit membutuhkan alat kesehatan canggih seperti CT-Scan 128 slice, ventilator ICU, serta perangkat anestesi ruang operasi. Perangkat tersebut diharapkan meningkatkan kecepatan diagnosis, memperluas kapasitas perawatan intensif, dan mengurangi antrean pasien yang selama ini semakin membludak. Namun, setelah alat-alat kesehatan tersebut datang dan diserahkan ke pihak rumah sakit, muncul permasalahan yang tidak diprediksi sebelumnya. Sebagian alat ternyata tidak dapat digunakan, CT-Scan 128 slice dibiarkan terbungkus dalam plastik tebal di sebuah ruangan penyimpanan, ventilator ICU menumpuk di sudut gudang, bahkan mesin anestesi yang baru dibeli belum dapat dipasang karena ruangan operasi yang seharusnya menampung alat itu belum selesai direnovasi.

Ketika wartawan dan masyarakat mempertanyakan kondisi tersebut, pihak rumah sakit memberikan berbagai alasan. Mulai dari penggerjaan instalasi listrik yang tertunda, renovasi gedung yang tidak selesai tepat waktu, hingga kurangnya teknisi yang mampu mengoperasikan alat canggih itu. Padahal, dana pengadaan alat sudah digunakan sepenuhnya bahkan seluruh pembayaran telah dilakukan sesuai kontrak pengadaan. Laporan masyarakat ini sampai ke telinga BPK RI. Melihat potensi kerugian negara dan pemborosan anggaran, BPK melakukan audit kinerja untuk menilai apakah program pengadaan alat kesehatan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil audit menunjukkan adanya ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang cukup signifikan. Pengadaan alat tidak mempertimbangkan kesiapan ruangan, instalasi listrik, dan kemampuan SDM. Perencanaan gedung dan pengadaan berjalan secara terpisah sehingga tidak saling mendukung. Bahkan, harga beberapa alat terbukti lebih tinggi dari standar pasar, sehingga anggaran tidak digunakan secara ekonomis. Akibat kondisi tersebut, masyarakat tidak merasakan peningkatan pelayanan yang dijanjikan. Antrean CT-Scan tetap panjang, kapasitas ICU tidak bertambah, dan pasien operasi masih harus menunggu lama. Alat-alat kesehatan yang seharusnya menyelamatkan banyak nyawa, justru terbengkalai karena manajemen program yang tidak terencana dengan baik. Meski pada akhirnya sebagian alat mulai dioperasikan setelah tindak lanjut rekomendasi BPK, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa program pemerintah tidak hanya harus berjalan sesuai aturan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Audit kinerja pun terbukti berperan besar dalam mengungkap

kelemahan manajemen dan mendorong perbaikan yang lebih baik ke depan.

Pertanyaan:

1. Apa saja kesalahan perencanaan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan pemerintah daerah dalam studi kasus tersebut?
2. Mengapa pengadaan alat kesehatan dalam kasus ini tidak memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E)?
3. Bagaimana audit kinerja membantu mengungkap kelemahan dalam pelaksanaan program pengadaan alat kesehatan?
4. Jika Anda menjadi auditor, rekomendasi apa yang akan Anda berikan untuk mencegah kasus serupa terjadi?